

DAMPAK PENERAPAN PSBB TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 DI DESA JULUPA'MAI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Fina Damayanti¹ Musyfikah Ilyas²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: finadamayanti00@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the impact of the implementation of PSBB on community income, especially in Julupa'mai Village, Gowa Regency during the Covid-19 pandemic. This research is a field research with a normative syar'i and juridical empirical approach, data sourced from primary data and secondary data. The results showed that the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Julupa'mai Village had an impact on people's income, especially the lower middle class. However, this can be alleviated with the help of the government during the pandemic, among others Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, and Jaring Pengaman Sosial, including assistance derived from programs that existed before Covid-19, such as Program Keluarga Harapan, Bantuan Pendidikan Anak, and Kartu Prakerja. From an Islamic perspective, the application of PSBB is considered as a form of government ijtihad in an effort to maintain the safety of life (hifdz nafs) of every citizen.

Keywords: Covid-19; Julupa'mai Village; PSBB; Community Income

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak penerapan PSBB terhadap pendapatan masyarakat khususnya di Desa Julupa'mai Kabupaten Gowa selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis empiris, data bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Desa Julupa'mai berdampak terhadap pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Namun hal ini dapat diringankan dengan bantuan pemerintah selama pandemi, antara lain Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Jaring Pengaman Sosial, termasuk bantuan yang berasal dari program yang telah ada sebelum Covid-19, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pendidikan Anak, dan Kartu Prakerja. Dalam perspektif Islam, penerapan PSBB dianggap sebagai bentuk ijtihad pemerintah dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (*hifdz nafs*) setiap warga negara.

Kata Kunci: Covid-19; Desa Julupa'mai; PSBB; Pendapatan Masyarakat

PENDAHULUAN

Wabah virus corona mulai merebak sejak akhir tahun 2019, dan pertama kali ditemukan dari Wuhan, Provinsi Hubei China.¹ Penyebaran virus corona sangat signifikan diseluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pencegah penyebaran virus tersebut. Salah satunya adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai virus tersebut. Pemerintah Indonesia juga telah membatalkan beberapa peristiwa besar dan mengeluarkan keadaan darurat berencana terkait dengan Covid-19 ini.² Dalam Program PSBB ini banyak fasilitas umum ditutup dengan tujuan mengurangi penyebaran virus corona.

Kebijakan mengenai PSBB di Indonesia pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia.³ Diterapkannya program PSBB ini merupakan salah satu cara menanggulangi penyebaran virus corona. Banyak upaya pemerintah lainnya namun program ini dianggap jauh lebih efektif. Program PSBB merupakan program yang dianggap sangat efektif dalam mengurangi serta memutus penyebaran virus corona. Program ini dapat diterapkan dengan baik apabila ada kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.

PSBB dianggap sebagai program yang masih lebih baik dari pada program *lockdown*. Sebab pada program *lockdown*, masyarakat betul-betul tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diluar rumah, bahkan seluruh aktivitas diluar rumah diberhentikan sehingga sangat berpengaruh dari segi sosial maupun ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat selama berdiam diri dirumah.⁴ Namun tentu saja meski program PSBB dianggap sebagai program yang sangat efektif, tetap saja banyak yang melanggar anjuran tersebut. Hal tersebut dikarenakan alasan keterpaksaan harus melakukan pekerjaan diluar rumah demi keberlangsungan hidup. Sebab, berdiam diri dirumah bukan berarti kebutuhan rumah tangga tidak perlu diupayakan.

¹ Fauziah Bakhtiar dkk. "Dampak Covid 19 Terhadap Perbandingan Harga Saham dan Volume Transaksi Penjualan Saham Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI." *Iqtisaduna* 6, no. 2 (Desember 2020): 168.

² Islamul Haq dkk. "I'tibar al Ma'alat Principles in MUI Fatwa Number 14 of 2020 Concerning Organizations of Workshop in Situations of The Covid-19 Outbreak." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2020): 2.

³ Aprista Ristyyawati. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 242.

⁴ Nila Sastrawati. "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2020): 24.

Terdapat banyak sektor yang mengalami tekanan hebat dengan adanya pandemi ini.⁵ Dapat diketahui bahwa di Indonesia banyak masyarakat yang berprofesi non formal seperti ojol, kuli bangunan, pedagang kaki lima dan sebagainya yang tentu sangat merasakan dampak dari anjuran pemerintah ini. Sehingga pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi ini. Namun tetap saja mayoritas masyarakat mengeluh terhadap kebijakan SPBB, sebab desakan ekonomi yang semakin menurun. Meskipun untuk menghadapi wabah yang memprihatikan ini, pemerintah membutuhkan rakyat untuk berkontribusi sesuai dengan kapabilitasnya dan kondisinya.⁶

Pandemi Covid-19 yang melanda bangsa-bangsa di dunia telah mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dari berbagai sektor kehidupan yang menuntun masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.⁷ Diantara sekian banyak kerugian dan masalah yang timbul akibat Covid-19 terdapat fenomena lain yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam,⁸ apalagi Indonesia masih merupakan negara yang sedang berkembang, maka dari itu perekonomian di Indonesia terkadang tidak stabil,⁹ sehingga membutuhkan upaya dan strategi khusus menjaga agar sistem perekonomian tidak ambruk.

Perekonomian adalah satu kesatuan yang terdiri dari konsumen dan produsen, merosotnya perekonomian membuat penurunan dratis bagi pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Sehingga masyarakat mengalami hambatan bahkan ada yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi dari Covid-19 akan menghentikan bisnis dari hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik.¹⁰

Penerapan kebijakan memang serba salah, jika PSBB diterapkan dengan ketat akan memutus mata rantai covid-19, namun akan semakin mencekik perekonomian negara maupun masyarakat kecil, terlebih kelompok masyarakat menengah kebawah. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang ada paling bawah tingkatannya dan

⁵ Nasrullah Bin Sapa, dkk. "Altruisme Dalam Sistem Ekonomi Islam: Memaksimalkan Nilai Spiritual dan Ketahanan Sosial Dalam Pandemi Covid-19." *Iqtishaduna* 6, no. 2 (2020): 146.

⁶ Della Fadhilatunisa, dkk. "Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Akuntansi Syariah." *Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 177.

⁷ Hamzah Hasan. "Pros and Cons of Online Criminal Case Settlement During the Covid-19 Pandemic : Study on Islamic Criminal Law." *al-Tasyri'iyyah* 1, no. 1 (2021): 16.

⁸ Ilham Ramadhan Eryafdi dan Nurul Fauziyyah. "Dampak Covid-19 Terhadap Tren Sektoral Harga Saham Syariah di Indonesia." *Iqtisaduna* 7, no. 2 (Juni, 2021): 2.

⁹ Muh. Aqil Fatahillah dan Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 403.

¹⁰ Trisno Wardy Putra, dkk. "The Role of Islamic Social Finance in Covid-19." *Iqtisaduna*: 6, no. 2 (Desember, 2020): 215.

paling dekat dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat.¹¹ Sebelum penerapan program PSBB seharusnya pemerintah memikirkan dampak terbesar dari program ini agar lebih cepat ditanggulangi. Pemerintah perlu menjamin tersediaan barang di daerah PSBB terkhusus ketersediaan bahan makanan. Mengetahui data akurat keluarga menengah kebawah sehingga dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran.

Namun meskipun tersedia bantuan dari pemerintah, tetap saja konsumtivisme masyarakat tetap meningkat, sehingga bantuan yang disalurkan masih belum memenuhi segala hal yang dibutuhkan masyarakat selama kebijakan PSBB ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat terpaksa melanggar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk di Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Sistem pemerintahan dalam Islam disebut siyasah syar'iyah yang berarti sistem pemerintahan berdasarkan syariah.¹² Hukum tata negara Islam atau siyasah syar'iyah merupakan sebuah doktrin hukum Islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Di dalam Islam sendiri, program PSBB dengan tujuan mengatasi penyebaran virus corona dianggap sebagai bentuk jihad yang dilakukan pemimpin dan umatnya atau pemerintah dengan rakyatnya dalam melawan wabah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam terkait dampak penerapan kebijakan PSBB terhadap pendapatan masyarakat Desa Julupa'mai Kabupaten Gowa, serta bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap kebijakan yang dianggap membatasi hak warga negara untuk beraktifitas termasuk mencari nafkah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif) dengan pendekatan normatif syar'i dan yuridis empiris.¹⁴ Lokasi penelitian dilakukan di Desa Julupa'mai Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh

¹¹ Mohammad Amar MS dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 388.

¹² Alda Amadiarti Salam, dkk. "Studi Krisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 245.

¹³ Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Negara Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 36.

¹⁴ Ummu Awaliah, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

dari sumber, yaitu adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁵ Pengolahan data menggunakan teknik seleksi data, pemeriksaan data serta klasifikasi data, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Pendapatan Masyarakat Menengah Kebawah

Virus Corona (*Covid-19*) merupakan wabah penyakit yang sangat berbahaya dan ditakuti oleh masyarakat. Virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Penyebarannya juga menimbulkan dampak yang besar bagi sektor perekonomian dan bisnis. Upaya untuk mengatasi pandemi *Covid-19* ini merupakan suatu upaya yang membutuhkan kerjasama dan keseriusan pemerintah untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara *at all cost*,¹⁷ dan di Indonesia dilakukan beberapa kebijakan diantaranya melalui Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB).

Memasuki tahun 2020, *Covid-19* semakin sulit dikendalikan, banyak kerugian yang ditimbulkan khususnya pada sektor perekonomian, baik negara maupun masyarakat.¹⁸ Setelah mengalami peningkatan kasus positif *Covid-19*, maka pemerintah segera mengambil langkah dengan memberlakukan PSBB yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Akibatnya, banyak aspek yang terkena imbasnya antara lain para pekerja harian, pelaku UMKM, usaha restoran (warung) dan usaha lainnya.

Pemerintahan desa yang dijalankan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berserta dengan fungsi-fungsinya lebih banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat termasuk dalam menjalankan kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.¹⁹ Desa

¹⁵ Kusnadi Umar and patawari patawari. 2021. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020". *PETITUM* 9 (1), 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

¹⁶ Hardani, dkk. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grou Yogyakarta, 2020): 17.

¹⁷ Dede Saidah. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah* 12, no. 2 (Desember, 2020): 29.

¹⁸ Kusnadi Umar. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 114-129.

¹⁹ Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 209.

memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakatnya.²⁰

Pada prinsipnya otonomi desa tidak jauh berbeda dengan konsep otonomi pemerintah, di mana setiap pemerintah daerah diberikan keluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri,²¹ termasuk bertanggungjawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19. Sebab dampak Covid-19 juga telah dirasakan oleh warga Desa Julupa'mai. Apalagi mata pencaharian warga Desa Julupa'mai banyak yang terdampak kebijakan PSBB, sebab berdasarkan data penduduk yang ada, memang mata pencaharian utama masyarakat di Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa adalah bertani, namun karena musim panen hanyalah dua (2) kali dalam setahun, maka warga harus memiliki pekerjaan alternatif seperti berjualan, buruh harian, dan ojek, yang kesemuanya terdampak PSBB.

Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa terdiri dari 820 KK, sehingga jika melihat dari jumlah mata pencahariannya dapat diketahui bahwa tidak sedikit warga yang memiliki mata pencahariannya lebih dari 1 pekerjaan. Baik itu dari masyarakat golongan atas maupun masyarakat menengah kebawah. Selama Covid-19, setidaknya terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin di Desa Julu'pamai, rentang penyakit dan PHK di Desa Julupa'mai selama pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari berkurangnya penghasilan secara drastis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nita, warga Desa Julu'pamai yang berprofesi sebagai penjahit:

“Selama pandemi ini orderan jahitan menurun karena dilarangnya pesta selama PSBB sehingga tidak dapat membantu pemasukan suami yang hanya buruh tani. Cara mengatasi masalah perekonomian kami hanyalah dengan mengirit kebutuhan sehari-hari dan menunggu bantuan pemerintah desa.”²²

Terkait menurunnya pendapatan masyarakat, juga diakui oleh Sekretaris Desa Julupa'mai, Sangkala Rala menyatakan bahwa:

“Selama pandemi ini dan berlangsungnya PSBB pendapatan masyarakat sangat menurun terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang dan buruh. Setelah diterapkannya PSBB, terjadi penurunan pendapatan masyarakat sekitar 80% dari sebelum Covid-19 hanya sekitar 60% tingkat kemiskinan di Desa ini.”²³

²⁰ Arisda Yanti dan Rahmiati. “Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna* 1, no. 3 (2020): 478.

²¹ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 10-12.

²² Yunita, Penjahit/Warga Desa Julupa'mai, wawancara, Desa Julupa'mai, tanggal 23 Juni 2021.

²³ Sangkala Rala, Sekretaris Desa Julupa'mai, wawancara, Desa Julupa'mai, tanggal 23 Juni 2021.

Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Abd. Haris Daneg Lau, Kepala Dusun Borong Tala Desa Julupa'mai:

“Pendapatan masyarakat di Dusun Borongtala hampir setengahnya mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis sekitar 50% warga di dusun saya yang mengalami keterpurukan selama PSBB ini. Untungnya mereka dapat bertahan dari bantuan-bantuan pemerintah.”²⁴

Adapun penurunan pendapatan masyarakat menengah kebawah di Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat terlihat dari peningkatan jumlah KK yang menerima bantuan setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa di Desa Julupa'mai terjadi peningkatan jumlah KK yang menerima bantuan dari tahun 2019-2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah KK yang Menerima Bantuan di Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

| No. | Dusun | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1. | Borongtala | 83 | 90 | 115 |
| 2. | Watu-Watu | 100 | 110 | 120 |
| 3. | Borong Jambu | 110 | 120 | 150 |
| 4. | Sogaya | 97 | 110 | 115 |
| Jumlah | | 390 | 430 | 500 |

Sumber: Kantor Desa Julupa'mai.²⁵

Data tabel di atas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penerima bantuan dari tahun 2019 yang cukup signifikan, dan salah satunya dipengaruhi oleh Covid-19, khususnya penerapan PSBB yang membatasi aktivitas warga-masyarakat dan hanya berdiam diri dirumah.

Pembatasan tersebut berakibat pada menurunnya pendapatan dan membengkaknya pengeluaran sehari-hari, sebagaimana pengakuan salah satu warga Desa Julupa'mai:

“Pendapatan saya selama PSBB benar-benar sangat sedikit, namun alhamdulillahnya berkat bantuan dari desa sehingga saya bisa berhemat untuk kebutuhan lainnya karena kebutuhan pangan seperti beras serta telur setiap bulannya dibagikan oleh desa.”²⁶

Penerapan kebijakan PSBB adalah suatu langkah untuk menimalisir penyebaran Covid-19, meski disisi lain memberikan dampak besar terhadap beberapa kelompok

²⁴ Abd. Haris Daeng Lau, Kepala Dusun Borongtala Desa Julupa'mai, wawancara, Julupa'mai, tanggal 23 Juni 2021.

²⁵ Pemerintah Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

²⁶ Wati, Warga Dusun Sogaya Desa Julupa'mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, wawancara, Desa Julupa'mai, tanggal 27 Juni 2021.

masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, karena sangat berpengaruh bagi ruang gerak mereka untuk mencari nafkah. Tetapi kebijakan tersebut tetap harus didukung sebagai bentuk ijtihad dalam menghadapi pandemi yang dapat diprediksi kapan akan berakhir. Besarnya dampak dari penerapan PSBB, disadari oleh pemerintah, sehingga melalui pelbagai program diharapkan dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa program bantuan tersebut antar lain:

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
- b. Bantuan Sosial Tunai (BST);
- c. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT);
- d. Jaring Pengaman Sosial (JPS); dan
- e. Beberapa program yang telah ada sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pendidikan Anak, Kartu Prakerja, UMKM dan lainnya.

2. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Program Pembatasan Sosial Berskala Besar

Penyebaran virus *Covid-19* yang semakin meluas, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah *Covid-19* pada tanggal 16 Maret 2020. Fatwa tersebut mendukung kebijakan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu masyarakat melakukan sebagian besar kegiatannya dirumah, baik pekerjaan maupun ibadah.

Dalam mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memperhatikan *al-Maqashid asy-Syar'iyah* dari segi hukumnya, yang tentu saja telah digabungkan dengan ijtihad, istihsan, istihlah dan sebagainya. *Siyasah Syar'iyah*, menurut batasan Ahmad Fathi Bahan adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara.²⁷ Sehingga dalam perspektif siyasah syar'iyah, teori *al-Maqashid asy-Syar'iyah* sangatlah membantu seorang mujtahid dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya saat ini.

Mengenai beberapa ketentuan dalam penerapan PSBB, seperti meliburkan sekolah, membatasi pekerjaan diluar rumah dan membatasi kegiatan keagamaan diluar rumah dapat dikategorikan sebagai kebijakan untuk menghadapi keadaan darurat, sehingga berlaku kaidah *ad-daruriyyah*. Hal tersebut dapat disandarkan pada pendapat al-Juwaini,

²⁷ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003): 2.

bahwa salah satu rukun *al-Maqashid asy-Syar'iyah* adalah didasarkan pada sesuatu yang dapat ditalar dan dipahami maknanya sehingga dimaknai menjadi sebuah ke-*dharurat-an*.²⁸

Kelima tujuan syariah yang dijadikan patokan hukum Islam dibagi menjadi tiga tahapan: 1) Dharuriat; 2) Hajiyat; dan 3) Tahsiniyat.²⁹ Kemampuan pemerintahan Islam dalam mitigasi bencana turut mendukung legitimasi kekuasaan.³⁰ Dalam kondisi pandemi *Covid-19*, umat muslim diharuskan berada dirumah, baik untuk bekerja, sekolah maupun ibadah yang dalam hal ini telah memenuhi *al-Maqashid asy-Syar'iyah* dalam arti mendesak atau kebutuhan darurat. Kategori-kategori ini termasuk antara lain :

- a) Hifdz ad-Din;
- b) Hifdz an-Nafs;
- c) Hifdz al-'Aql;
- d) Hifdz an-Nasb; dan
- e) Hifdz al-Mal.³¹

Pada prinsipnya, Syariah Islam diturunkan untuk mempertahankan kelima poin tersebut. Sementara jika dikaitkan antara program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kelima poin dalam *al-Maqashid asy-Syar'iyah*, maka program Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dikategorikan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan jiwa (*hifdz Nafs*).

KESIMPULAN

Program Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas warga-masyarakat dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran *Covid-19*. Tetapi disisi lain, program tersebut juga berdampak terhadap pendapatan warga-masyarakat, khususnya warga-masyarakat yang aktivitasnya berada diluar rumah, termasuk warga Desa Julu'pamai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Sepanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk memastikan keselamatan tiap-tiap warga negara dari virus *Covid-19*, maka upaya tersebut telah sejalan dengan prinsip *al-Maqashid asy-Syar'iyah* yaitu menjaga jiwa (*hifdz Nafs*) lebih utama dari pada menjaga harta.

²⁸ Hidayatullah dan Nasrullah. "Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Lmination in Indonesia Viewed of The Theory of *al-Maqashid asy-Syar'iyah*." *Syariah* 20, no. 1 (2020): 52.

²⁹ Hamzah Hasan dan La Ode Ismail Ahmad. "The Correlation Between Human Rights and Human Obligations (An Analysis of Islamic Criminal Law)." *Diskursus Islam* 8, no. 2 (Agustus, 2020): 74.

³⁰ Subehan Khalik. "Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi." *al-Risalah* 20, no. 1 (Mei, 2020): 6.

³¹ Hidayatullah dan Nasrullah: 53.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amar MS, Mohammad dan M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyash Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (Mei, 2021).
- Amadiarti Salam, Alda, dkk. “Studi Krisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyash Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Negara Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syari’ah).” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Awaliah, Ummu dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Bakhtiar, Fauziah, dkk. “Dampak Covid-19 Terhadap Perbandingan Harga Saham dan Volume Transaksi Penjualan Saham Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI.” *Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020).
- Bin Sapa, Nasrullah, dkk. “Altruisme Dalam Sistem Ekonomi Islam: Memaksimalkan Nilai Spiritual dan Ketahanan Sosial Dalam Pandemi Covid-19.” *Iqtishaduna* 6, no. 2 (2020).
- Ersyafdi, Ilham Ramadhan dan Nurul Fauziyyah. “Dampak Covid-19 Terhadap Tren Sektoral Harga Saham Syariah di Indonesia” *Iqtisaduna* 7, no. 2 (2021).
- Fadhilatunisa, Della, dkk. “Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Akuntansi Syari’ah.” *Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020).
- Fatahillah, Muh. Aqil dan Andi Tenri Padang. “Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Haq, Islamul, dkk. “I’tibar al Ma’alat Principles in MUI Fatwa Number 14 of 2020 Concerning Organizations of Workshop in Situations of the COVID-19 Outbreak.” *al-Risalah* 21, no. Nomor 1, (2020).
- Hasan, Hamzah. “Pros and Cons of Online Criminal Case Settlement During the Covid-19 Pandemic: Study on Islamic Criminal Law.” *al-Tasyri’iyyah* 1, no. 1 (2021).
- Hasan, Hamzah dan La Ode Ismail Ahmad. “The Correlation Between Human Rights and Human Obligations (An Analysis of Islamic Criminal Law).” *Diskursus Islam* 8 Nomor 2, (Agustus, 2020).
- Hidayatullah dan Nasrullah. “Enforcement of Health Law: The Large Scale Social Limination in Indonesia Viewed of the Theory of al-Maqashid asy-Syar’iyyah.” *Syariah* 20, no. 1 (2020).
- Khalik, Subehan. “Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi.” *al-Risalah* 20, no. 1 (2020).
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.” *Administrative law & Governance Journal* 3, Issue 2, (Juni, 2020).
- Sastrawati, Nila. “Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat.” *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2020).

- Saidah, Dede. “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Daerah* 2, no. 2 (2020).
- Sandi dan Andi Safriani. “Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2020).
- Wardy Putra, Trisno, dkk. “The Role of Islamic Social Finance in Covid-19.” *Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020).
- Yanti, Arisda dan Rahmiati. “Pengelolaan BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara.” *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Umar, Kusnadi and patawari patawari. 2021. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020”. *PETITUM* 9 (1), 78-87, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

Buku

- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Djazuli., *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

Wawancara

- Abd. Haris Daeng Lau, Kepala Dusun Borongtala Desa Julupa’mai, wawancara, Julupa’mai, tanggal 23 Juni 2021.
- Sangkala Rala, Sekretaris Desa Julupa’mai, wawancara, Desa Julupa’mai, tanggal 23 Juni 2021.
- Wati, Warga Dusun Sogaya Desa Julupa’mai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, wawancara, Desa Julupa’mai, tanggal 27 Juni 2021.
- Yunita, Penjahit/Warga Desa Julupa’mai, wawancara, Desa Julupa’mai, tanggal 23 Juni 2021.